

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A Garner, Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Eighth Edition a Thomson Business West
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakhriah, Efa Laela, 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 1994, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- , Seri Film Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia, Buku Pendamping, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mansyur, Ridwan dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 2001, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*. Dalam buku Rudhy 445 A. Lontoh, Kailimang, Denny & Ponto, Benny: *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.
- Suparman, Eman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Kemi, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Imaji Cipta Karya, Jakarta.
- Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Media Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya, Andika. dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Fakhriah, Efa Laela, “Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 258-270.
- Muhammadin, Fajri Matahati, Rizky Wirastomo, dan Tata Wijayanta, “Hambatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Hak Keadilan Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 18, Nomor Edisi Khusus, Oktober 2011, hlm 165-186.
- Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 482-497.
- Stephanie, Francis Ward, “Small Claim Court the “Fast Food” of the Legal System, *American Bar Association Journal*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2011.
- Tjoneng, Arman. “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Volume 8, Nomor 2, April 2017, hlm. 93-106.
- Wijayanta, Tata. “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 20, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 193-410.
- , “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 330-346.
- Wijayanta, Tata, dkk. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Hakim Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 572-587.
- Wijayanta, Tata. “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

C. Hasil Penelitian

Perlita Nathania, 2018, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan Melalui Gugatan Sederhana (Studi Penetapan No. 2/Pdt.G.S/2017/PN.GTO)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Daris Manullang, “Implementasi Syarat Kepailitan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Terhadap Pembayaran Utang Pada Saat Proses Persidangan Kepailitan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Hukum Online, “Masalah Kepailitan Ada di Luar Proses Sidang,”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-kepailitan-ada-di-luar-proses-sidang-lt58760a88bd879>, diakses pada 21 Oktober 2022.

Hukum Online, “Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court/>, diakses pada 21 Oktober 2022.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847-23
(*Burgerlijk Wetboek*).

Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: *Staatsblad* (1848 – 16, S. 1941 - 44).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG *Staatsblad* 1927 No.227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

F. Wawancara

Dominggus Silaban, 2022, Proses Penyelesaian Perkara Perdata, *Wawancara*, 28 Juli.

Eddy Sameaputty, 2022, Proses Penyelesaian Perkara Perdata, *Wawancara*, 22 Juni.